

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan Ekonomi

1. Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi.³¹ Sedangkan ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Jadi pembangunan ekonomi adalah proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian manusia dalam kesehariannya.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.³² Menurut Irawan dan Suparmoko, Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita.³³

³¹Abd.Rachim AF, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset,2015), hal.68.

³² Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar:CV Sah Media,2017), hal.1.

³³ Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan...*, hal.5.

Dari definisi diatas, Lincolin mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur pokok dan sifat sebagai berikut.³⁴

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal)

Proses pembangunan ekonomi secara prinsip bukan hanya menyangkut fenomena ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai dimensi yang lebih luas dan kompleks. Pembangunan ekonomi selain menyangkut dimensi ekonomi, juga menyangkut dimensi sosial, politik, kelembagaan dan lain sebagainya. Dalam proses pembangunan ekonomi, fokus utama sasaran pembangunan selain pertumbuhan, pemerataan, juga menyangkut dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lingkungan dan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat ini bisa dilakukan dengan mendorong pengembangan inisiatif dan partisipasi masyarakat yang

³⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.11.

lebih kreatif dan produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, serta pengembangan kualitas kelembagaan untuk menunjang penciptaan lapangan kerja bagi penduduk dan masyarakat setempat. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau pembangunan ekonomi lokal.

Pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional yang juga mencakup perubahan-perubahan yang mendasar di dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (*institutional development*), selain aspek-aspek ekonomi seperti kenaikan pendapatan per kapita, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Todaro menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.³⁵

2. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Tujuan utama dalam pembangunan adalah untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi diantara negara-negara di dunia dan di dalam

³⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.13.

negara itu sendiri.³⁶ Tujuan utama dalam pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual dan penyegaran kehidupan budaya.³⁷

Tujuan inti pembangunan:³⁸

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa.

³⁶ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 03.

³⁷ Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 01.

³⁸ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi...*, hal. 28-29.

3. Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.³⁹

2. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh ketidak merataan distribusi pendapatan. Lewat pemahaman yang mendalam akan masalah ketidakmerataan dan kemiskinan, memberikan dasar yang baik untuk menganalisis dasar pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan perdesaaan, pendidikan, perdagangan internasional dan sebagainya.⁴⁰

3. Kemiskinan

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yairu sandang, pangan dan papan.⁴¹

4. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

a. Strategi Upaya Minimum Kritis

Leibanstein dalam Hanly mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (*steady*

³⁹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.214.

⁴⁰ *Ibid.* hal.224-225.

⁴¹ Ardianto Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), hal.09.

economic growth) diperlukan kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum kritis tertentu.⁴²

Menurut Leibenstein dalam Hanly, setiap ekonomi tunduk pada hambatan dan rangsangan. Hambatan berdampak menurunkan pendapatan per kapita dari tingkat sebelumnya, sementara rangsangan cenderung akan meningkatkan pendapatan itu mendapat rangsangan yang lebih kuat daripada faktor – faktor yang dapat menurunkan pendapatan, maka usaha minimum kritis itu dapat tercapai dan suatu perekonomian akan bisa berkembang.⁴³

b. Strategi Pembangunan Seimbang

Istilah pembangunan seimbang diciptakan oleh Nurkse. Strategi pembangunan seimbang diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara bebarengan sehingga industry tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. selain itu, strategi pembangunan seimbang ini juga dapat diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor.⁴⁴ Misalnya antara sektor produktif dan sektor prasarana, sektor industry dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik. Singkatnya, pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama.

⁴² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.81.

⁴³ *Ibid.* hal.82.

⁴⁴ *Ibid.* hal.89.

c. Strategi Pembangunan Tak Seimbang

Strategi ini dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut Albert dan Paul dalam Hanly, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola pembangunan tak seimbang menurut Hirschman berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.⁴⁵

- 1) Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang
- 2) Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya – sumberdaya yang tersedia
- 3) Pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan – gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

Pembangunan tak seimbang ini akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda. Hal ini yang akan menimbulkan suatu ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Namun keadaan tersebut akan merangsang perkembangan usaha – usaha lain yang terkait. Selain itu akan merangsang pula untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Dengan demikian pembangunan tak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang.

⁴⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.99.

B. Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.⁴⁶

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Salah satu inisiatif dalam pembangunan ekonomi daerah tersebut adalah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk dijadikan sesuatu yang dapat bernilai komersial (keuntungan), sesuai dengan Pedoman Pelatihan yang diterbitkan oleh UN-HABITAT, pembangunan ekonomi lokal (*local eco-nomic development*, **LED**) adalah proses

⁴⁶ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.298.

partisipatori di mana semua pihak dari semua sektor di lokal tersebut bekerja bersama-sama untuk menstimulasi aktivitas komersial sehingga tercipta kondisi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. *LED* sebagai sarana untuk membantu menciptakan lapangan kerja yang layak dan memperbaiki kualitas hidup setiap orang, termasuk mereka yang tergolong miskin dan terpinggirkan.⁴⁷

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Hal ini sesuai dengan paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah⁴⁸

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru

⁴⁷ Mit Witjaksono, "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan", *JESP*, Vol. 1, No. 1, 2009, hal.5, dalam <https://scolar.google.co.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019, pukul 19.00 WIB.

⁴⁸ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.302.

Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

2. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:⁴⁹

a. Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas

Tujuan strategi pembangunan fisik atau lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah. Adapun beberapa alat untuk mencapai tujuan pembangunan ini adalah pembuatan bank tanah, pengendalian perencanaan dan pembangunan, penataan kota, pengaturan tata ruang, penyediaan perumahan dan pemukiman yang

⁴⁹ Hanly Fendy Djohar Siwu, "Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah", *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Universitas Sam Ratulangi Manado, hal.8, dalam <https://scolar.google.co.id>., diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 09.30 WIB.

baik, penyediaan infrastruktur seperti sarana air bersih, listrik, tanaman, parkir dan sebagainya.

b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Adapun beberapa alat untuk mengembangkan diantaranya, penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, pembuatan pusat informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, pembuatan sistem pemasaran bersama, pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan dan sebagainya.

c. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karenanya kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan dengan sistem *customized training*, pembuatan bank keahlian (*skillbanks*), penciptaan iklim yang mendukung bagi berkembangnya lembaga – lembaga pendidikan dan ketrampilan (LPK) di daerah, pengembangan lembaga pelatihan bagi penyandang cacar dan sebagainya.

d. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam Bahasa populer sekarang ini sering dikenal dengan istilah kegiatan pemberdayaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya penciptaan proyek – proyek padat karya untuk memenuhi keuntungan dari usahanya.

3. Kebijakan Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Kebijakan pembangunan pedesaan secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok, yaitu:⁵⁰

a) Kebijakan Tidak Langsung

Kebijakan ini diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan melalui pengembangan kegiatan sosial ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

b) Kebijakan Langsung

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan khususnya masyarakat berpendapatan

⁵⁰Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat...*, hal.55.

rendah. Dalam hubungan ini, pendekatan yang tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi.

c) Kebijakan Khusus

Kebijakan ini diutamakan pada penyiapan penduduk untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya khusus ini pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar. Bagian dari kebijakan khusus adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses serta pembentukan lembaga yang memberi layanan secara terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan pedesaan diharapkan ikut berperan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas di pedesaan yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan permukimannya. Selain itu, meningkatnya akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Upaya pencapaian tersebut akan dilakukan melalui enam langkah kebijakan pokok, yaitu:⁵¹

⁵¹ Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2009), hal.152.

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis dan partisipatif
- b) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan dan mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
- c) Mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis
- d) Mewujudkan produktifitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang maju, mandiri, dan berorientasi pasar yang didukung lembaga keuangan mikro pedesaan
- e) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan
- f) Terus mengupayakan peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pedesaan secara lebih merata.

Keenam langkah kebijakan pokok tersebut menjadi acuan utama dalam mengarahkan program pembangunan yang meliputi : program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, program pengembangan ekonomi lokal, program peningkatan prasarana dan sarana perdesaan, pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana serta prasarana pos dan telematika, program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, program peningkatan ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis.

C. Koperasi Unit Desa

1. Definisi Koperasi

Mohammad Hatta dalam Arifin Sitio, sebagai bapak koperasi mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.⁵²

Selain itu, Munker dalam Arifin juga mendefinisikan bahwa koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalanka urusan secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusan semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.⁵³

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I Pasal 1, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵⁴

Dari beberapa pendapat diatas, koperasi adalah suatu lembaga atau badan hukum yang berazaskan kekeluargaan yang saling bergotong royong

⁵² Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta:Erlangga,2001), hal.18.

⁵³ *Ibid*.hal.18.

⁵⁴ Hendi Sobari, "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Desa Dengan Mengoptimalkan Fungsi Dan Peran Koperasi Di Kecamatan Pagerageung", *Jurnal Economica*, ISSN : 2527-6247 Vol.1 No.1, hal.30, dalam <https://scolar.google.co.id>, diakses pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 21.00 WIB.

dalam kegiatannya sebagai gerakan membangun ekonomi rakyat yang lebih baik.

2. Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa, pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Salah satu unit usaha yang diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi bangsa, khususnya ekonomi pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu yang telah terbentuk di masing-masing desa.

Koperasi Unit Desa (KUD) dalam pengertian sempit adalah koperasi yang anggotanya meliputi masyarakat pedesaan. Sedangkan menurut Sastra dalam Hendi Sobari, KUD adalah salah satu lembaga di pedesaan yang pada saat ini dirasakan sebagai wadah yang setidak tidaknya mampu memperlancar keberhasilan dan tercapainya program-program yang dibuat oleh pemerintah.⁵⁵

Kini Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan koperasi serba usaha yang usahanya meliputi semua bidang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan atau industri, kelistrikan di pedesaan, jasa dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵ Hendi Sobari, "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Desa Dengan Mengoptimalkan Fungsi Dan Peran Koperasi Di Kecamatan Pagerageung" ..., hal.31.

⁵⁶ Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi...*, hal.13.

- a) Perkreditan
- b) Penyediaan dan penyaluran sarana atau alat-alat produksi, barang-barang keperluan hidup sehari-hari dan jasa-jasa lainnya
- c) Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman dan produksi lainnya yang dihasilkan industri-industri rumah (*home industries*) di pedesaan
- d) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, angkutan pedesaan dan lain sebagainya

Dengan demikian Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan badan usaha yang vital bagi masyarakat pedesaan yang dapat menggairahkan dan meningkatkan kerja penduduk pedesaan sehingga produk yang dihasilkannya (kuantitas dan kualitas) juga akan meningkat, pendapatan per kapita penduduk pedesaan makin tinggi dan kesemuanya ini berarti peningkatan kesejahteraan hidupnya. Jika pendapatan penduduk naik maka menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berarti turut memperlancar pembangunan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan.

3. Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Indonesia

Dalam pasal 33 UUD 1945, menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian internal tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojowasito, arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian.

Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.⁵⁷

Hal ini tidak terlepas dari jatidiri koperasi itu sendiri yang dalam gerakan dan cara kerjanya selalu mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam asas-asas pembangunan nasional seperti yang termaktub dalam GBHN yaitu:⁵⁸

a) Asas Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

b) Asas Manfaat

Asas ini mengandung arti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini memperjelas fakta bahwa nilai-nilai asas manfaat ini sangat melekat pada

⁵⁷ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi:Teori dan Praktik...*, hal.128.

⁵⁸ *Ibid.*hal.131.

institusi koperasi. Dalam koperasi, usaha-usaha yang ditangani harus bermanfaat dan ditujukan demi peningkatan kesejahteraan anggotanya.

c) Asas Demokrasi Pancasila

Asas ini mengandung arti bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Asas ini sangat tercermin dalam diri koperasi terutama dalam rapat anggota. Anggota sendirilah yang menentukan aturan-aturan organisasi yang harus dipatuhi bersama tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak luar koperasi. Disamping itu, adanya prinsip koperasi *one men one vote* (satu anggota satu suara) akan semakin memperjelas pelaksanaan asas demokrasi yang utuh.

d) Asas Adil dan Merata

Asas ini mengandung arti bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Asas ini sudah nampak pada salah satu sendi-sendi dasar koperasi yaitu pembagian sisa hasil usaha (SHU) diatur menurut jasa masing-masing anggota. Dasar ini berwatak nonkapitalis karena pembagian SHU

kepada anggota adalah berdasarkan atas jasa usaha anggota tersebut, bukan berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi.

e) Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan Dalam Perikehidupan

Asas ini mengandung arti bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerah, kepentingan perikehidupan darat, laut, udara dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional.

Koperasi selain mengutamakan kepentingan pribadi anggota-anggotanya, juga memikirkan kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap koperasi senantiasa mencanangkan di dalam anggaran dasarnya ketentuan-ketentuan tentang penggunaan SHU-nya untuk kepentingan masyarakat di lingkungan di mana koperasi itu berada.

f) Asas Kesadaran Hukum

Asas ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

g) Asas Kemandirian

Asa ini mengandung arti bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersandikan kepada kepribadian bangsa. Asas ini juga merupakan

salah satu sendi dasar koperasi yaitu swadaya, swakerta dan swasembada sebagai percerminan dari pada prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Dengan demikian asas ini juga melekat pada institusi koperasi.

h) Asas Kejuangan

Asas ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional penyelenggara negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. dalam koperasi asas ini sangat jelas terlihat pada visi koperasi yaitu satu untuk semua dan semua untuk satu.

i) Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Asas ini mengandung arti bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dalam pengembangan usaha dan lembaganya, koperasi tidak mengabaikan perkembangan IPTEK tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur bangsa.

4. Koperasi Sebagai Sarana Kebijakan Pembangunan Nasional

Pendapat Eugene Staley dalam Kartasapoetra menyatakan bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menjaminnya

berkembangnya demokrasi, maka satu-satunya alat ekonomi dan sosial yang mengandung nilai-nilai kedemokrasian itu adalah koperasi, yang di pedesaan berkat dorongan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa telah dibentuk oleh warga desanya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD).⁵⁹

Menurut Wardhani dalam Panuntun mengungkapkan bahwa kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu didalamnya memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.⁶⁰

Permasalahan mendasar yang ada pada usaha kecil dan koperasi diantaranya kurangnya kemampuan manajemen dan profesionalisme serta terbatasnya akses permodalan, teknologi dan terutama pada jaringan pemasaran. Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah ini adalah melalui kemitraan usaha antara yang besar dengan yang kecil, antara yang kuat dan yang lemah. Melalui kemitraan diharapkan mampu menjadi solusi cepat mengatasi kekurangan dan keterbatasan usaha kecil dan koperasi.

Kemitraan dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan

⁵⁹ Kartasapoetra G dkk, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1984), hal.211-212.

⁶⁰ Panuntun dkk , “Peranan KUD Karya Mina Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Nelayan Di Kota Tegal”, *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, ISSN:2252-6293, 2013, hal.27, dalam <https://scolar.google.co.id>., diakses pada tanggal 01 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Kemitraan dikatakan juga sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, ini merupakan satu landasan pengembangan usaha.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara KUD dengan masyarakat bisa dikatakan dengan kemitraan. Yang mana saling terkait dan memberikan kesempatan masyarakat desa umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan menuju perbaikan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan atau pembangunan nasional yang lebih baik.

Indonesia sebagai Negara berkembang telah memajukan dan menggerakkan koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Maka dari itu, koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemandirian, keanggotaan yang bersifat terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, pendidikan perkoperasian serta kerjasama antar

koperasi. Prinsip-prinsip tersebut membedakan koperasi dengan badan usaha lain.⁶¹

D. Agrobisnis

1. Definisi Agrobisnis

Agrobisnis berasal dari Bahasa Yunani dan Bahasa Inggris yakni *agros* yang berarti ladang dan *business* yang berarti kegiatan perniagaan atau perdagangan. Meskipun *agros* berasal dari kata ladang, pengertian agrobisnis mencakup pula kegiatan peternakan (sapi, kambing, ayam, dan itik) dan kegiatan perikanan, baik perikanan air tawar maupun air payau. Selain itu, agrobisnis juga mencakup kegiatan budi daya air laut, seperti budi daya rumput laut, kerapu, dan kepiting.⁶²

Penyebutan kata agrobisnis atau agribisnis sebenarnya sama saja, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata agrobisnis lebih dibakukan dan dianjurkan untuk digunakan karena memiliki deret pertalian makna dengan kata-kata lainnya, seperti agroindustri, agroekonomi, agroekosistem, agrokimia dan agrowisata. Sementara itu, dasar pertimbangan masyarakat yang banyak menggunakan istilah agribisnis adalah merujuk dari kata dalam Bahasa Inggris yakni *agribusiness*.⁶³

Konsep agribisnis sebenarnya adalah suatu konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang

⁶¹ Subrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 125.

⁶² F.Rahardi, *Cerdas Beragrobisnis: Mengubah Rintangan Menjadi Peluang Berinvestasi*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2003), hal.5.

⁶³ *Ibid.* hal.6.

berkaitan dengan kegiatan pertanian. Sebagaimana menurut Arsyad dalam Soekartawi, yang dimaksud dengan agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.⁶⁴ Yang dimaksud dengan ada hubungannya dengan pertanian dalam artian yang luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.⁶⁵

Subiakto Tjakrawerdya dalam Liya Sukma Muliya mengatakan bahwa Secara umum agrobisnis mengandung pengertian sebagai keseluruhan operasi yang terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan dan mendistribusikan input produksi, aktivitas untuk produksi usaha tani, pengolahan sampai ke tingkat pemasaran.⁶⁶

Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu, usaha tani, hilir, dan penunjang. Menurut Saragih dalam Madziatul Churiyah batasan agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait diantara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir, subsistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian”.⁶⁷ Agribisnis diartikan sebagai

⁶⁴ Soekartawi, *Agribisnis:Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003), hal.2.

⁶⁵ *Ibid*.hal.2.

⁶⁶ Liya Sukma Muliya dan Sri Ratna Suminar, “Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Dalam Pengembangan Agrobisnis Melalui Pondok Pesantren Al-Ittifaq”, *Jurnal Ethos*, Vol.III No. 1 Januari-Juni 2005:49-54, hal.50, dalam <https://scolar.google.co.id>., diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 20.00.WIB.

⁶⁷ Madziatul Churiyah, ”Model Pembangunan Pertanian Melalui Penerapan Agropolitan dan Agrobisnis Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Modernisasi*, Volume 2,

sebuah system yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan : (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran.⁶⁸

2. Sistem Agribisnis

Secara konseptual sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktifitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi (*input*) sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani serta agroindustri, yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yaitu:⁶⁹

1) Subsistem Agribisnis atau Agroindustri Hulu

Meliputi pengadaan sarana produksi pertanian antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemabrantas hama dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, alat-alat mesin dan peralatan produksi pertanian.

2) Subsistem Budidaya atau Usahatani

Usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga dan tanaman hias, hasil ternak, hewan dan ikan. Pelaku kegiatan dalam subsitem ini adalah produsen yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias dan lain-lain.

3) Subsistem Agribisnis atau Agroindustri Hilir

Nomor 1, hal.54, dalam <https://scolar.google.co.id>, diakses pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

⁶⁸ *Ibid*.hal.54.

⁶⁹ Silvana Maulidah, *Pengantar Manajemen Agribisnis...*, hal.6.

Subsistem ini meliputi pengolahan dan pemasaran (tata niaga) produk pertanian dan olahannya. Dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan dan distribusi.

- 4) Subsistem jasa layanan pendukung agribisnis (kelembagaan) atau *supporting institution*

Yang dimaksud subsistem ini adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan sub-sistem hulu, sub-sistem usaha tani, dan sub-sistem hilir.

3. Kemitraan dalam Agrobisnis

Dalam sektor agrobisnis, petani pada umumnya tidak memproduksi jumlah yang cukup memungkinkan petani tersebut melakukan bisnis langsung dengan pedagang besar atau eceran. Oleh karena itu koperasi di suatu daerah sangat dibutuhkan.⁷⁰ Karena itu dengan adanya koperasi yang dilandasi dengan kemitraan, akan lebih memudahkan petani bersama-sama dapat memasarkan produknya dengan lebih efisien dan memenuhi jumlah yang diminta oleh konsumennya. Sistem kemitraan sangat diperlukan bagi sebuah koperasi dalam mengatasi permasalahan yang ditemui di koperasi dan usaha kecil diantaranya, kurangnya kemampuan manajemen dan profesionalisme serta terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi, terutama jaringan pemasaran. Kemitraan sendiri tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha yang

⁷⁰ Liya Sukma Muliya dan Sri Ratna Suminar, *Perjanjian Kerjasama...*, hal.51.

berbunyi: “Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil (koperasi) dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.⁷¹

Selanjutnya melalui koperasi sarana produksi (*supply cooperative*) memungkinkan anggota untuk mengumpulkan sumber daya pembelian sarana produksi seperti bibit, pupuk, alat pertanian dan sebagainya. Pembelian dalam jumlah yang besar secara bersama-sama akan mengurangi biaya, menjamin pasokan dan memungkinkan untuk mendapat kualitas yang lebih baik.

4. Risiko Dan Mengelola Risiko Dalam Agribisnis

Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku dalam sistem agribisnis untuk mentransfer risiko dan mengurangi dampak suatu risiko terhadap kelangsungan usahanya. Risiko produksi secara fisik, kemungkinan merosotnya volume produksi secara drastis yang mungkin disebabkan oleh bencana alam, serangan hama dan penyakit, kebakaran dan faktor-faktor lainnya yang akibatnya dapat diperhitungkan secara fisik dapat ditanggulangi dengan membeli polis asuransi produksi pertanian. Penanggungian risiko produksi tersebut dialihkan kepada perusahaan jasa asuransi dengan membayar premi asuransi.

⁷¹ Liya Sukma Muliya dan Sri Ratna Suminar, *Perjanjian Kerjasama...*, hal.51.

Risiko kemungkinan menurunnya kualitas produksi dapat ditanggulangi dengan penerapan teknologi budi daya dan teknologi pasca panen yang tepat. Dilain pihak, risiko pasar dapat ditanggulangi dengan beberapa cara yakni:⁷²

a) Diversifikasi

Menurut Duft dalam Gumbira, diversifikasi berarti tampil dalam berbagai jenis bentuk.⁷³ Pada umumnya, diversifikasi berhubungan dengan jenis-jenis produk atau jasa yang berbeda-beda dalam suatu penawaran bisnis. Diversifikasi merupakan salah satu cara untuk mengeliminasi dampak negatif atau resiko yang dihadapi seorang pengusaha agribisnis.

b) Integrasi Vertical

Integrasi vertical dalam arti mikro adalah suatu perusahaan yang bergerak pada dua atau lebih level dalam suatu sistem komoditas, sedangkan dalam arti makro dimana dua atau lebih perusahaan memiliki keterkaitan bisnis yang kuat dalam suatu sistem komoditas tertentu.

c) Penerapan Teknologi

Penerapan teknologi dalam dunia usaha dapat mengurangi risiko tertentu yang mungkin timbul. Risiko biaya produksi terlalu tinggi dapat ditekan dengan penerapan teknologi produksi yang tepat. Dengan teknologi produksi yang tepat, maka produktivitas sumber daya akan

⁷² Gumbira Said dan Harizt Intan, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), hal.114.

⁷³ *Ibid.*hal.114.

meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula efisiensi usaha sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasaran.

d) Kontrak Dimuka (*forward contracting*)

Kontrak dimuka (*forward contracting*) adalah suatu proses persetujuan pengiriman produk pada masa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan sekarang. Kontrak dimuka lebih menjamin kepastian harga yang harus diterima oleh penjualan produsen pada masa pengiriman produk nanti. Fluktuasi harga yang akan terjadi tidak akan mempengaruhi tingkat harga yang telah disepakati pada saat persetujuan kontak dibuat.

e) Pasar Masa Depan (*future market*)

Pasar masa depan (*future market*) adalah suatu sistem pasar yang menyediakan fasilitas untuk menanggapi perdagangan secara cepat dalam unit produk terstandarisasi dalam mutu dan jumlah yang akan dikirim pada masa yang akan datang. Para pedagang dalam *future market* berspekulasi terhadap kemungkinan perubahan harga yang dapat menguntungkan tindakan dan keputusan mereka. Dengan demikian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan para pedagang dalam *future market* dapat dianggap sebagai keputusan dan tindakan spekulasi yang menawarkan peluang keuntungan dan kerugian atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan.

Namun demikian, *future market* bukan hanya sekedar spekulasi atau mengadu untung, tetapi sangat besar manfaatnya jika digabungkan

dengan pasar tunai (*cash market*) dimana secara fisik komoditas yang diperdagangkan benar-benar berada di tangan. Penggabungan *future market* dan *cash market* ada yang dikenal dengan usaha perlindungan (*hedging*) dan yang dikenal dengan *option*. Keduanya digunakan untuk mentransfer risiko.

f) Usaha Perlindungan (*hedging*)

Usaha Perlindungan (*hedging*) adalah suatu upaya perlindungan risiko transaksi dalam *cash market* dengan *forward contracting* yang menggunakan *future market* dan mengambil posisi yang sama besar tetapi berlawanan pada *cash market* dan *future market* secara simultan.

Upaya perlindungan tersebut diantaranya :

- 1) *The Selling Hedge*, adalah suatu tipe *hedge* yang digunakan oleh orang atau lembaga yang memiliki atau menyimpan sejumlah komoditas untuk mengalihkan risiko kemungkinan turunnya harga dengan menjual *future contract* melalui *future market*. Tipe ini dapat dilakukan oleh petani, pedagang perantara, dan industry pengolahan.
- 2) *The Buying Hedge*, adalah suatu tipe *hedge* yang dapat digunakan oleh orang atau lembaga yang ingin membeli komoditas tertentu untuk penggunaan pada masa yang akan datang dengan jalan membeli *future contract* melalui *future market* untuk memproteksi posisinya dalam *cash market* dalam menghadapi kemungkinan meningkatnya harga komoditas tersebut. Tipe ini dapat dilakukan oleh para pedagang perantara dan industry pengolahan.

g) Pasar Opsi (*options Market*)

Pasar opsi (*options market*) memberikan hak kepada pembeli opsi untuk memilih posisi sebagai pembeli, penjual *future contract*, atau tidak memilih sama sekali tetapi bukan merupakan kewajiban. Pembeli opsi tersebut dapat membeli atau menjual *future contract* pada waktu tertentu, pada masa yang akan datang untuk suatu tingkat harga yang telah disepakati (*strike price*) pada saat opsi. Penggunaan pasar opsi memerlukan kecermatan dalam memprediksi pergerakan harga.

E. Ekonomi Pembangunan

1. Devinisi Ekonomi Pembangunan

Ekonomi Pembangunan bisa didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah – masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara – cara untuk mengatasi masalah – masalah itu agar negara – negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.⁷⁴

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari pilihan–pilihan. Ilmu ekonomi muncul karena ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kenyataan ini mendorong manusia untuk melakukan pilihan–pilihan penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari ilmu ekonomi secara lebih mendalam agar

⁷⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.6.

dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apapun yang kita kerjakan tidak akan lepas dari masalah ekonomi.

2. Ruang Lingkup Pembahasan Ekonomi Pembangunan

Beberapa bidang penting yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan antara lain masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan, masalah pembentukan modal masalah pengalihan tabungan, masalah bantuan luar negeri.⁷⁵ Pembahasan –pembahasan dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah pembahasan mengenai pembangunan ekonomi baik yang bersifat deskriptif maupun analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sifat perekonomian dan masyarakat di negara sedang berkembang serta implikasi sifat – sifat tersebut kepada kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan tersebut. Kelompok kedua bersifat memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang.⁷⁶

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Strategi Pembangunan

⁷⁵Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*, hal.5.

⁷⁶ *Ibid.* hal.6.

Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Koperasi Unit Desa Tani Wilis Berbasis Agribisnis di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung’.

Penelitian Sirilius Nafanu⁷⁷ bertujuan untuk menemukan model pengembangan koperasi unit desa (KUD) berbasis agribisnis di pedesaan Swapraja Biboki dengan metode kualitatif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pembangunan KUD di swapraja biboki untuk mempercepat ekonomi daerah sangat perlu adanya kemitraan, yang mana pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi didaerah yang dapat mendukung berjalannya KUD, antara lain : masyarakat tani, pengusaha kecil dan industri rumah tangga, serta peran serta pihak swasta. Dengan adanya kemitraan ini dapat memberi keuntungan kepada KUD yaitu : transfer teknologi yang lebih unggul, memperoleh informasi dan peluang pasar secara cepat, dapat membuka akses terhadap modal dan pasar, serta adanya jaminan dan kepastian pasar bagi produk industri kecil rumah tangga. Persamaan penelitian ini terletak pada tujuannya dimana pada penelitian ini menunjukkan upaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitian di beberapa KUD di wilayah Biboki berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih fokus pada satu tempat yaitu KUD Tani Wilis di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

⁷⁷ Sirilius Nafanu, "Model Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Berbasis Agribisnis di Pedesaan Swapraja Biboki", *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 2016, ISSN 2502-1710, dalam <https://scolar.google.co.id>., diakses pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 09.30 WIB.

Penelitian Sabarman Damanik⁷⁸ bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan dalam usaha meningkatkan pendapatan petani melalui agribisnis kelapa yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitiannya adalah terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tidak berkembangnya sistem agribisnis kelapa di Indragiri Hilir, antara lain adalah: (1) sebagian besar teknologi belum dapat digunakan petani, (2) kurangnya diversifikasi produk kelapa. Strategi pengembangan sistem agribisnis kelapa di Indragiri Hilir, Riau, harus dilakukan melalui: (1) diversifikasi produk melalui pemanfaatan tempurung, sabut dan lidi serta minyak murni (VCO), sehingga dapat merubah permintaan menjadi elastis untuk meningkatkan daya serap pasar, (2) program promosi pasar di pasar dunia baik melalui lembaga promosi propinsi Riau, dan (3) pemberdayaan petani melalui kelembagaan yang sudah ada seperti kelompok tani, dan koperasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitiannya yaitu kualitatif dan sama-sama menunjukkan bagaimana upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan agrobisnis, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian yang langsung berfokus pada industri kelapa sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat melalui lembaga koperasi berbasis agrobisnis.

⁷⁸ Sabarman Damanik, "Strategi Pengembangan Agribisnis Kelapa (*Cocos nucifera*) untuk Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau", *Jurnal Perspektif*, Vol. 6 No. 2 / Desember 2007. Hal 94 – 104 ISSN: 1412-8004, dalam <https://scoolar.google.co.id>., diakses pada tanggal 15 April 2019, pukul 11.00 WIB.

Penelitian Madziatul Churiyah⁷⁹ bertujuan pembangunan pertanian melalui penerapan agropolitan dan agrobisnis dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memaparkan tentang strategi yang digunakan untuk membangun kawasan agropolitan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan keajahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing. Model pembangunan tersebut berfokus pada modernisasi pertanian dengan strategi diantaranya : perubahan teknologi dan inovasi, perbaikan pola pemilikan tanah, kebijaksanaan-kebijaksanaan penunjang dan tujuan pembangunan terpadu. Persamaan penelitian ini adalah metode penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada strategi pembangunannya yang tidak menunjukkan dimana dan lembaga apa yang seharusnya berkewajiban melakukan pembangunan tersebut dan hanya berfokus pada penjelasan yang bermaksudkan memberi informasi secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti akan lakukan lebih berfokus pada strategi dari lembaga Koperasi Unit Desa Tani Wilis Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan berbasis agrobisnis.

⁷⁹ Madziatul Churiyah, "Model Pembangunan Pertanian Melalui Penerapan Agropolitan dan Agrobisnis Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah", *Jurnal Modernisasi*, Volume 2, Nomor 1, dalam <https://scolar.google.co.id>., diakses pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

Penelitian Siswanto Imam Santosa, Agus Setiadi dan Ratih Wulandari⁸⁰ bertujuan menentukan kondisi subsistem agribisnis sapi perah di Kecamatan Musuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sapi perah di Kecamatan Musuk. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan teknik simple random sampling dan metode observasi dan wawancara secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan peternak sebesar Rp.228.991,27/bulan. Nilai R/C ratio sebesar 1.28, analisis regresi menunjukkan umur peternak total produksi susu dan biaya pakan berpengaruh nyata terhadap pendapatan peternak. *Location Quotient* (LQ) populasi sebesar 1,67 dan nilai LQ sebesar 1,075. Analisis SWOT menunjukkan total skor internal dan skor eksternal sebesar 3,15 dan 318. Hasil menunjukkan bahwa sapi perah potensial dikembangkan di Kecamatan Musuk. Persamaan penelitian ini adalah pada strategi pengembangannya yang menggunakan paradigma agrobisnis dan dari segi tujuannya, yang sama –sama meneliti tentang usaha atau bagian dari strategi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Perbedaannya pada pada metode penelitian dan objek yang digunakan, pada penelitian ini hanya berfokus pada para peternak sapi perah saja, sedangkan penelitian yang peneliti akan lakukan melalui lembaga koperasi dan dampaknya lebih kepada anggota maupun bukan anggota atau masyarakat desa pada umumnya .

⁸⁰ Siswantor Imam Santosa dkk, “Analisis Potensi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah Dengan Menggunakan Paradigma Agribisnis Di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Buletin Peternakan*, Vol.37(2):125-135, Juni 2013, dalam <https://scholar.google.co.id>., diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 19.15 WIB.

Penelitian IGP.Sarasutha, Lintje Hutahaean, Rahmat H.Anasiru, dan Margaretha S.Lalu⁸¹ bertujuan mendapatkan data dan informasi usahatani padi berbasis agribisnis, mengetahui peran setiap subsistem dalam sistem agrobisnis, mengetahui efektivitas kebijakan pemberasan terhadap pendapatan petani di Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan teknik PRA dan suvai serta analisis data menggunakan cara deskriptif dan analisis *input-output* usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani padi memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga dapat menjadi komoditas unggulan di Kapet Batui, peran setiap subsistem dalam sistem agribisnis cukup baik, dan kebijakan pemberasan cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan petani karena korelasi harga di tingkat petani dengan harga ditingkat pengecer atau konsumen dan posisi tawar petani cukup kuat. Impilkasi kebijakan yang diperlukan di masa datang pada lokasi ini untuk mendukung usahatani padi berbasis agribisnis adalah meningkatkan jumlah peralatan dan mesin pertanian untuk usahatani padi seperti traktor, alat perontok (*thresher*) dan penggilingan gabah (*Rice milling unit*) yang dikelola oleh swasta yang mendapat pinjaman atau kredit lunak. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada paradigma penelitiannya yang berbasis agrobisnis. Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yang menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif.

⁸¹ IGP.Sarasutha dkk, “Usahatani Padi Berbasis Agribisnis Di Sentra Produksi Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah”, *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, Vol.7,No.1, Januari 2004:1-17, dalam <https://scholar.google.co.id>., diakses pada tanggal 21 April 2019, pukul 09.00 WIB.

Penelitian Almasdi Syahza dan Suarman⁸² bertujuan menentukan strategi pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Bengkalis. Penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan penelitian ini memerlukan data primer dengan pengambilan data dilakukan dengan metode *rapid rural appraisal (RRA)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang tepat untuk pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Bengkalis adalah dengan cara pembangunan sektor berbasis agribisnis karena sebagian besar penduduknya merupakan petani dan nelayan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada tujuan, yaitu menentukan strategi yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa yaitu dengan program pembangunan ekonomi melalui kegiatan agrobisnis. Namun terdapat pula perbedaan penelitian yaitu pada metode penelitian yang mana peneliti hanya memfokuskan pada pendekatan kualitatif saja dan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Penelitian Rizki Rahajuning Tyas⁸³ bertujuan mengidentifikasi sektor apa saja yang menjadi basis ekonomi wilayah Kabupaten Situbondo, mengidentifikasi penyebaran sarana dan prasarana pembangunan, mengidentifikasi kondisi lingkungan internal dan eksternal pembangunan,

⁸² Almasdi Syahza dan Suarman, "Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2013, Volume 14 Nomor 1, dalam <https://scolar.google.co.id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 19.15 WIB.

⁸³ Rizki Rahajuning Tyas, "Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur", *Skripsi*, 2006, Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, dalam <https://scolar.google.co.id>, diakses pada tanggal 16 Mei 2019, pukul 18.25 WIB.

serta merumuskan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Situbondo. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder bersifat kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Situbondo pada periode 2000-2004 adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi. Dari hasil analisis skalogram, secara umum keberadaan dan kelengkapan sarana prasarana pembangunan di wilayah Kabupaten Situbondo relatif memadai, tetapi masih terakumulasi di daerah-daerah perkotaan. Hasil analisis Matriks IFE menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo memiliki kondisi internal yang lemah, artinya kondisi kabupaten yang lemah disebabkan oleh belum optimalnya penelitian dan pengembangan yang ada serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Hasil analisis Matriks EFE menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo belum mampu memanfaatkan kekuatan yang di miliki untuk memanfaatkan peluang. Berdasarkan hasil analisis Matriks IE Wilayah Kabupaten Situbondo, berada pada sel ke-V dari matriks IE. Pada posisi ini, pembangunan wilayah di Kabupaten Situbondo harus bisa mempertahankan kekuatan dan hal-hal yang telah dicapai selama ini dalam pembangunan untuk selanjutnya semakin ditingkatkan dalam upaya mewujudkan strategi pembangunan yang telah disusun dengan merealisasikan program-program yang dimiliki Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT diperoleh 12 alternatif strategi yang dirumuskan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil analisis Matriks QSP strategi yang menjadi prioritas utama, adalah strategi meningkatkan potensi SDA dengan

memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah,; strategi meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA serta pengembangan Litbang melalui pemanfaatan teknologi. Persamaan penelitian ini adalah tujuannya yaitu menentukan strategi untuk pembangunan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, dimana penelitian yang akan peneliti lakukan hanya menggunakan pendekatan kualitatif saja.

Penelitian Ummi Nurul Hidayah⁸⁴ bertujuan menentukan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan dalam perspektif islam di Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah Demak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan standar hidup tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Persamaan dengan penelitian ini adalah tujuannya yang sama-sama menentukan strategi guna membangun ekonomi masyarakat, sedangkan

⁸⁴ Ummi Nurul Hidayah, “Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, Semarang, 2018, dalam <https://scolar.google.co.id>, diakses pada tanggal 05 Mei 2019, pukul 19.00 WIB.

perbedaannya pada tidak adanya objek lembaga yang menentukan strategi dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa.